

## PENGARUH ADANYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERHADAP KESENJANGAN EKONOMI DI INDONESIA

Annisa Aminda, Renea Shinta Aminda

Universitas Ibn Khaldun Bogor, INDONESIA

Email: [renea@uika-bogor.ac.id](mailto:renea@uika-bogor.ac.id)

---

| Diterima/Submitted: 27 Februari 2024 | Direvisi/Revised: 19 Mei 2024

| Diterima/Accepted: 25 Mei 2024 | Dipublikasikan/Published: 26 September 2024 |

---

### *Abstract*

*The implementation of development in the past only emphasized the goals of economic progress which had an impact on environmental damage and social problems. Sustainable Development Approach is essentially a development activity that integrates economic, social, and environmental aspects. The purpose of this study is to find out whether Sustainable Development has an Effect on Economic Gaps in Indonesia. The method used in this research is the descriptive qualitative method. The results of this research explain that, although Sustainable Development in Indonesia produces fairly stable economic growth every year, but it has not been able to solve the problem of economic disparity between regions. Therefore, the government has a policy to relocate the capital city, with the aim that the concept of sustainable development in Indonesia can run well so that the problem of economic gaps can be solved.*

**Keywords:** *sustainable, development, economic, gaps.*

### **Abstrak**

Pelaksanaan Pembangunan pada masa lalu yang hanya menekankan pada tujuan kemajuan ekonomi yang telah berdampak kepada kerusakan lingkungan dan timbulnya masalah sosial, Seperti Masalah Kesenjangan antar wilayah. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan pada Hakekatnya adalah kegiatan pembangunan yang memadukan aspek ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pembangunan Berkelanjutan mempunyai Pengaruh terhadap Kesenjangan Ekonomi di Indonesia. Metode

yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, walaupun Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil di tiap tahun, akan tetapi nyatanya belum dapat mengatasi masalah kesenjangan ekonomi antar wilayah. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan pemindahan Ibu kota, dengan tujuan agar konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat berjalan dengan baik sehingga masalah kesenjangan ekonomi dapat teratasi.

**Kata-kata Kunci:** pembangunan, berkelanjutan, kesenjangan, ekonomi.

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan sekarang merupakan komitmen setiap orang, sadar, atau tidak sadar, yang bergelut di bidang pembangunan. Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan dalam konteks negara selalu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kearah yang lebih baik dan merata. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya. Proses Pembangunan terutama bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Titik tolak pembangunan dimulai dari Tindakan mengurangi masalah dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan untuk mencapai sesuatu yang layak.

Kesenjangan ekonomi di Indonesia merupakan persoalan klasik yang tidak pernah tuntas, sekalipun setiap rezim pemerintahan selalu berupaya untuk menurunkan kesenjangan ekonomi (ratio gini) dan angka kemiskinan dengan melakukan berbagai solusi kebijakan, namun upaya tersebut belum memadai, bahkan cenderung tidak beranjak turun. Kondisi ini semakin memprihatinkan, terlebih Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi yang cukup pelik, mulai dari daya beli masyarakat rendah, kesenjangan ekonomi antar pelaku, penguasaan konsentrasi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak yang kian menurun, ketersediaan anggaran belanja negara semakin terbatas serta pengendalian utang luar negeri yang tidak terkontrol.

Pelaksanaan Pembangunan pada masa lalu yang hanya menekankan pada tujuan kemajuan ekonomi yang telah berdampak kepada kerusakan lingkungan dan timbulnya masalah sosial. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan pada Hakekatnya adalah kegiatan pembangunan

yang memadukan aspek ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Pendekatan Pembangunan pada Sektor Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan menitikberatkan pada meningkatnya keahlian pekerja agar bisa meningkatkan daya saing untuk memperoleh pekerjaan yang layak, serta terdorongnya kerja sama ekonomis yang strategis dan peningkatan performa infrastruktur dasar seperti perumahan, air, jalan dan lain sebagainya hingga infrastruktur informasi.

Adapun Teori Pendukung, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian : (1) Teori Pendukung dari penelitian ini adalah Teori Perkembangan Pemikiran Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sejak sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (sustainability) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* (Meadow et al., 1972) dalam kesimpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (on sustainable basis). (2) Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh adanya Pembangunan Berkelanjutan terhadap Kesenjangan Ekonomi di Indonesia, (3) Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh dari Pembangunan Berkelanjutan terhadap Kesenjangan Ekonomi di Indonesia.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian

orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil *World Summit 2005* menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan (Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2013).

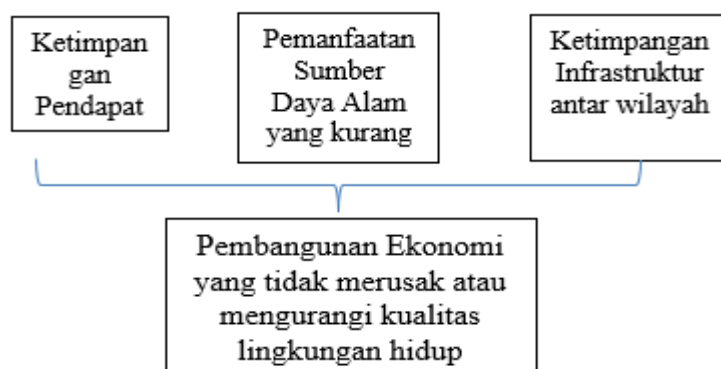
Dari sisi ekonomi setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (Fauzi, 2004).

Kesenjangan Ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Persoalan Kesenjangan Ekonomi mencakup kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran dan kesetaraan kesempatan (Fletcher, 2013).

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Ada beberapa macam kesenjangan yang kerap kali mengganjal suatu masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan, yaitu : (1) kesenjangan antar daerah, (2) kesenjangan antar sektor, dan (3) kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat (Basri, 1995 : 92).

Isu kesenjangan dan pertumbuhan hingga kini masih merupakan debat yang tak berkesudahan dalam konteks pembangunan. Menurut Kuncoro (2003:135) seringkali ada trade off antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di negara-negara sedang berkembang dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Menurut World Bank (1990:55), antara pertumbuhan dan kemiskinan bukanlah suatu trade-off yang tidak dapat diatasi. Dengan kebijakan yang tepat, golongan miskin dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan, dan jika mereka dapat melaksanakan hal tersebut, penurunan tingkat kemiskinan akan konsisten dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Adapun Kerangka Pemikiran, yaitu sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya (Kumalasari, 2019). Kerangka Pemikiran dalam penelitian merupakan proses keberhasilan pembelajaran. Selain itu, kerangka pemikiran memberikan berbagai permasalahan yang penulis hadapi dan permasalahan objek yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, Penulis akan mengkaji menggunakan metode kualitatif deskriptif tentang bagaimana Pembangunan Berkelanjutan dapat mempengaruhi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia.



Gambar 1. Pembangunan Berkelanjutan dapat mempengaruhi Kesenjangan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi memainkan peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat karena melibatkan berbagai sektor, termasuk pertanian, industri, dan jasa, yang menjadi sumber utama pendapatan bagi banyak masyarakat (Ariyanti R, Lutfi M, 2023; Maulani D dkk, 2023). Salah satu aspek utama pembangunan ekonomi adalah investasi dalam infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik mempermudah akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, pelaku usaha di berbagai sektor dapat beroperasi lebih efisien, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Yanuarsyah I dkk, 2024; Ramadhany T, Maulani D, 2024).

Selain itu, pendidikan dan pelatihan merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja, sehingga mereka mampu bersaing di pasar kerja yang lebih luas dan beragam. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan mempercepat pertumbuhan inklusif. Pelatihan kejuruan atau pengembangan keterampilan kerja juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi formal, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka (Aminda R dkk, 2024). Kemudian, pembangunan ekonomi juga mendorong investasi dalam sektor teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi modern di sektor-sektor seperti pertanian dan manufaktur dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, dan mendorong ekspor. Dengan demikian, perekonomian menjadi lebih kompetitif di tingkat global (Aminda R, Aminda A, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable

yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya (Prasetyo, 2016).

Objek dari Penelitian ini adalah Implementasi dari Pembangunan Berkelanjutan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap Kesenjangan Ekonomi. Sedangkan Subjek dari Penelitian ini adalah Masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di Luar Pulau Jawa.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Studi Pustaka. Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti (Setiawan, 2020). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Sumber tidak langsung (Data Sekunder).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam jangka waktu 10 tahun belakangan ini, pembangunan di Indonesia mengalami banyak kemajuan dari berbagai aspek yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dari aspek pertumbuhan ekonomi, pada periode 2005-2011. Selama periode 2005-2011, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tergolong positif yaitu pada kisaran 5 sampai 6,5% per tahun.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang berada diatas 5%, memberikan dampak pada pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang ikut meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2006 sebesar Rp. 14.991,1 ribu dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 30.813,0 ribu. Bersamaan dengan itu, memberikan dampak terhadap angka pengangguran yang juga mengalami penurunan pada tahun 2005 sebesar 11,2% dan turun menjadi 6,5% pada tahun 2011. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin yang ikut mengalami penurunan yaitu pada tahun 2005 sebesar 15,9% dan turun menjadi 12,4% pada tahun 2011.

Kemajuan dari aspek bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial juga telah banyak mengalami peningkatan yaitu dari segi Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2011 telah mencapai angka sebesar 91%, sementara dari segi Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai angka sebesar 68%. Demikian juga dari segi Angka Melek Huruf (AMH) juga terjadi penningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2005. Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2011 tingkat nasional telah mencapai angka



92,81%. Gambaran mengenai pembangunan ekonomi dan sosial mungkin belum cukup untuk menilai pembangunan Indonesia. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, dari bidang pembangunan ekonomi tidak dapat terlepas dari pembangunan bidang yang lain, yaitu salah satunya adalah bidang pembangunan lingkungan.

Tabel 1. Perbandingan Pertumbuhan PDRB tahun 2006-2010

Pulau	PDRB Harga Konstan (Triliun Rp)			Lahan Kritis (000 Ha)		
	2006	2010	Rata-rata Pertumbuhan per tahun	2006	2010	Rata-rata Pertumbuhan per tahun
Sumatera	389,07	468,06	4.73	25898.97	24771.47	-1.11
Jawa dan Bali	1093,32	1385,13	6.09	3663.70	4317.00	4.19
Kalimantan	160,69	190,34	4.32	27918.05	28012.61	0.08
Sulawesi	79,15	106,89	7.80	6218.21	7610.81	5.18
Nusa Tenggara, Maluku & Papua	55,72	71,18	6.31	14107.95	17464.55	5.48
<b>Indonesia</b>	<b>1777,95</b>	<b>2221,60</b>	<b>5.73</b>	<b>77806.88</b>	<b>82176.44</b>	<b>1.38</b>

Sumber : BPS dan Kementerian Kehutanan

Pada tabel 1 di atas menunjukkan data mengenai perbandingan pertumbuhan antara PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang diambil dari 5 kepulauan Indonesia dengan rata-rata menunjukkan pertumbuhan lahan yang kritis. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan pada tahun 2006-2010 pada setiap kepulauan di Indonesia mengalami adanya pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebesar 4-8% dan dalam lingkup nasional sebesar 5,73%. Namun, sejalan dengan adanya pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Indonesia juga mengalami adanya pertumbuhan pada lahan kritis yaitu sebesar 1,38%, dengan adanya pertumbuhan lahan kritis yang terbesar terdapat pada kepulauan Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku.



Tabel 2. Perbandingan IPM dan IKLH tahun 2009-2011

Provinsi	IPM						IKLH					
	2009		2010		2011		2009		2010		2011	
	IPM	Rank	IPM	Rank	IPM	Rank	IKLH <sup>0</sup>	Rank	IKLH <sup>0</sup>	Rank	IKLH <sup>0</sup>	Rank
NAD	71,31	17	71,70	17	72,10	18	72,47	12	77,30	11	66,74	16
Sumatera Utara	73,80	8	74,19	8	74,65	8	62,48	19	87,17	6	72,21	12
Sumatera Barat	73,44	9	73,78	9	74,28	9	87,04	2	81,46	9	77,00	9
Riau	75,60	3	76,07	3	76,53	3	51,65	25	54,86	22	56,23	24
Jambi	72,45	13	72,74	13	73,30	13	75,04	9	62,82	17	64,92	18
Sumatera Selatan	72,61	10	72,95	10	73,42	10	69,30	14	75,70	13	77,50	8
Bengkulu	72,55	12	72,92	11	73,40	11	79,58	4	96,89	4	96,77	3
Lampung	70,93	21	71,42	21	71,94	20	73,64	11	86,95	7	86,57	4
Kep. Bangka Belitung	72,55	11	72,86	12	73,37	12	52,15	24	64,92	15	64,99	17
Kepulauan Riau	74,54	6	75,07	6	75,78	6	51,65	25	54,86	22	56,23	24
DKI Jakarta	77,36	1	77,60	1	77,97	1	41,73	30	41,81	29	41,31	30
Jawa Barat	71,64	15	72,29	15	72,73	16	49,69	27	53,44	23	50,90	27
Jawa Tengah	72,10	14	72,49	14	72,94	14	55,40	22	50,48	25	49,82	28
DI Yogyakarta	75,23	4	75,77	4	76,32	4	53,52	23	71,91	14	68,89	14
Jawa Timur	71,06	18	71,62	18	72,18	17	59,01	21	49,49	27	54,49	25
Banten	70,06	23	70,48	23	70,95	23	50,86	26	48,98	28	48,98	29
Bali	71,52	16	72,28	16	72,84	15	85,50	3	99,65	1	85,30	5
Nusa Tenggara Barat	64,66	32	65,20	32	66,23	32	73,69	10	90,15	5	84,30	7
Nusa Tenggara Timur	66,60	31	67,26	31	67,75	31	66,61	18	50,72	24	50,01	23
Kalimantan Barat	68,79	28	69,15	28	69,66	28	71,92	13	76,39	12	74,27	10
Kalimantan Tengah	74,36	7	74,64	7	75,06	7	45,70	29	50,38	26	63,98	19
Kalimantan Selatan	69,30	26	69,92	26	70,44	26	48,25	28	58,24	21	60,29	21
Kalimantan Timur	75,11	5	75,56	5	76,22	5	68,63	15	62,22	19	70,75	13
Sulawesi Utara	75,68	2	76,09	2	76,54	2	88,21	1	84,18	8	84,59	6
Sulawesi Tengah	70,70	22	71,14	22	71,62	22	68,51	16	97,58	3	98,53	2
Sulawesi Selatan	70,94	20	71,62	19	72,14	19	67,62	17	62,89	16	62,64	20
Sulawesi Tenggara	69,52	25	70,00	25	70,55	25	60,53	20	62,23	18	52,79	26
Gorontalo	69,79	24	70,28	24	70,82	24	-	-	97,93	2	98,89	1
Sulawesi Barat	69,18	27	69,64	27	70,11	27	67,62	17	62,89	16	67,85	15
Maluku	70,96	19	71,42	20	71,87	21	78,80	6	79,72	10	73,09	11
Maluku Utara	68,63	29	69,03	30	69,47	30	78,80	5	79,72	10	73,09	11
Papua Barat	68,58	30	69,15	29	69,65	29	73,30	8	59,56	20	68,51	22
Papua	64,53	33	64,94	33	65,36	33	75,30	7	59,56	20	68,51	22
Indonesia	71,76		72,27		72,77		59,79		61,07		60,25	

Sumber : BPS dan Kementerian Lingkungan Hidup

Data perbandingan IPM dan IKLH tersebut merupakan analisa melalui kondisi per provinsi. Provinsi yang memiliki IPM paling tinggi seperti DKI Jakarta itu memiliki IKLH urutan terendah dari tahun 2009 ke 2011 IKLH DKI Jakarta telah mengalami penurunan. Sulawesi Utara dengan IPM yang meningkat dan tidak pernah berubah pada urutan 2 tahun 2009-2011 menunjukkan IKLH yang ,memburuk dari tahun 2009 ke 2011, dari urutan 1 mengalami penurunan menjadi urutan ke 6. Tidak hanya Sulawesi Utara, Papua juga mengalami penurunan kualitas lingkungan berdampingan dengan peningkatan IPM. IPM tersebut meningkat dari tahun 2009 ke 2011, sehingga menyebabkan penurunan IKLH dari 75,3 menjadi 68,51.

Provinsi yang mempunyai pertumbuhan IPM yang cenderung tidak pernah berubah (konstan), seperti Bengkulu dan Kalimantan Tengah telah menunjukkan perbaikan kualitas lingkungan (IKLH yang meningkat dari tahun 2009 ke 2011). Secara nasional, IPM meningkat dari tahun 2009-2011 dan IKLH tersebut juga meningkat dari 2009 ke 2011, tetapi pada saat tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010. Dari penjelasan tersebut, kondisi Indonesia menunjukkan adanya hubungan negatif antara pembangunan dengan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, Indonesia perlu pemikiran konsep pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan ekonomi itu juga diiringi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Untuk tercapai pembangunan berkelanjutan tersebut. Indonesia harus lebih meningkatkan pemakaian sumber daya terbarukan serta penggunaan energi agar lebih efisien. Data

Statistik Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2013. Pada penggunaan energy fosil, seperti batubara, BBM, dan gas bumi telah menunjukkan peningkatan dari tahun 2006-2011, sedangkan pada penggunaan energy biomasa telah mengalami peningkatan yang tidak signifikan dari tahun 2006-2011.

Berkaitan dengan isu perubahan iklim. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) merupakan lembaga dibawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environment Programme (UNEP) menyebutkan bahwa perubahan iklim tersebut disebabkan oleh bermacam hal antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Sektor energy adalah penghasil emisi karbon yang menggelontorkan 12.628 Mt CO<sub>2</sub> ke atmosfer.

Selain deforestasi dan degradasi hutan ditunjuk sebagai penyumbang emisi karbon terbesar kedua yang akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim global. Berikut Negara-negara seperti Brazil yang menggaap penyumbang emisi yang tinggi., masing-masing sebesar 2.563 dan 1.372 Mt CO<sub>2</sub>. Selanjutnya pada urutan ketiga penghasil emisi adalah dari sector pertanian dengan total emisi sebesar 2.912 Mt CO<sub>2</sub> yang didominasi oleh Negara Cina serta diikuti oleh negra Brasil dan India. Sedangkan emisi karbon tersebut yang berasal dari sampah dengan perkiraan sebesar 635 Mt CO<sub>2</sub> dimana sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Cina, serta india. Total emisi karbon tersebut dapat menghasilkan melalui empat sector yang mencapai kurang lebih 20.645 t CO<sub>2</sub> (IPCC.2000).

Berdasarkan data *Human Development Report* tersebut yang diberitakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2008. Indonesia menempati sebagai Negara dengan peringkat ke -14 yang menghasilkan emisi karbon di dunia. Jauh pada Negara-negara maju yang mengeluarkan karbon ke atmosfer pada kegiatan industri. Emisi GRK terjadi pada sector kehutanan di Indonesia yang sebagian besar berasal dari deforestasi (perubahan pada hutan untuk penggunaan lainnya seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, prasarana wilayah) dan degradasi (penurunana pada kualitas hutan) yang terjadi akibat *illegal logging, over cutting*, kebakaran, ladang berpindah dan perambahan.

Pada upaya penanggulangan untuk perubahan iklim, pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan *Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap* (ICCSR). RAN-GRK merupakan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam perencanaan untuk penurunan

emisi gas rumah kaca. Untuk itu emisi gas rumah kaca tersebut yang diturunkan merupakan berasal dari sector kehutanan, lahan gambut, pertanian, energi, transportasi, industry dan limbah. Pada perencanaan itu pemerintah menata secara detail program untuk pengurangan emisi pada sector-sektor tersebut serta detail nilai dari sumber pendanaan yang digunakan. RAN-GRK ini diatur untuk mengarahkan pemerintah dalam melaksanakan tujuannya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tersebut sebesar 26%. Selain nasional, perancangan ini disusun pada setiap daerah melalui RAD-GRK.

Berdasarkan hasil studi tentang *Mitigation Fiscal Framework* (MFF) yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 2012, jika diperkirakan alokasi belanja pada lingkungan hidup (khususnya pada mitigasi untuk perubahan iklim) tetap dari tahun 2010 hingga 2020, untuk penurunan emisi yang dihasilkan sebesar 116 juta ton emisi CO<sub>2</sub> (15%). Selanjutnya apabila alokasi belanja ditambah sesuai dengan RAN-GRK pada penambahan proporsional tahun 2020, didapatkan hasil pengurangan emisi sebesar 147 juta ton emisi CO<sub>2</sub> sebesar 20%. Ini memperlihatkan adanya gap negatif sebesar 6% demi mencapai komitmen pengurangan emisi sampai 26%.

Berdasarkan kondisi kebijakan fiscal di atas memperlihatkan bahwa pemerintah pendirian dengan tujuan untuk pembangunan berkelanjutan dan komitmennya dalam pengurangan emisi. Untuk itu kebijakan tersebut tidak sesuai dengan RAN-GRK yang telah pemerintah rancang. Hal itu ditunjukkan pada presentase anggaran untuk alokasi lingkungan hidup yang menurun pada setiap tahunnya. Namun apabila pendanaan konstan pada tahun 2012, dana itu tidak mencukupi untuk tercapainya tujuan pengurangan emisi, tetapi pemerintah dalam RAPBD pada tahun 2015, pemerintah itu menurunkan alokasi dana untuk lingkungan hidup.

Selanjutnya fakta tersebut menunjukkan bahwa pengawasan untuk penggunaan dana itu belum dilaksanakan dengan baik karena menggunakan dana masih dipakai untuk hal yang tidak berdampak langsung pada perbaikan kualitas lingkungan. Selain itu, pelaksanaan dari pendanaan masih terbatas. Hal itu memungkinkan terjadinya karena sulitnya dalam pelaksanaan pendanaan yang ada kepada program perbaikan perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Tujuan terpenting dari pembangunan adalah pengurangan kemiskinan, yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Jadi, terdapat hubungan segitiga antara pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan merupakan hubungan dua arah. (BKKBN, 2013).

Kesenjangan ekonomi serta ketimpangan distribusi pendapatan terjadi antara kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah serta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line), faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi yaitu masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau kurang mendukung, terjadinya kenaikan harga secara terus menerus, serta bertambahnya jumlah pengangguran, yang merupakan salah satu faktor terjadinya kemiskinan. Dimana faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam meningkatkan terjadinya kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan.

Semakin tinggi jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah akan menjadi tinggi beban pembangunan. Oleh sebab itu pembangunan dikatakan berhasil bila jumlah dan persentase penduduk miskin akan semakin berkurang. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia. Sehingga apabila Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Sehingga dengan rendahnya produktivitas maka berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan yang menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2016)

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui salah satu indikator yaitu melalui PDRB per kapita atau PDB per kapita pada daerah masing-masing. PDRB per kapita adalah nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing penduduk yang diakibatkan adanya suatu aktivitas produksi. Pertumbuhan PDRB yang tinggi dan PDRB per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, serta basis pemungutan pajak yang lebih besar yang memungkinkan pemerintah untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat miskin (Norton, 2002).

Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gagasan upah minimum yang sudah dimulai sejak awal tahun 1970-an yang bertujuan untuk mengusahakan

agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh (Sumarsono, 2003).

Untuk kesenjangan ekonomi antar wilayah tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini. Tanda-tanda tersebut mencerminkan pertumbuhan ekonomi pada dua dekade terakhir yang masih terpusat dikawasan bagian barat di Indonesia. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyebutkan pemerintah yang terus menerus mengedepankan pembangunan Indonesia dari Timur yang tepat pada agenda Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

Dalam bidang infrastruktur strategi ini mencakup pada investasi untuk memperbaiki konektifitas dan transportasi, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan diluar pulau jawa, dalam upaya untuk mempercepat pengembangan pada kawasan perbatasan, kepulauan terluar, dan daerah tertinggal. Ia menguraikan tujuan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dapat menghasilkan pengentasan kemiskinan yang terdistribusi dan signifikan agar lebih merata, terkhusus pada kawasan timur Indonesia yang kaya akan sumberdaya alamnya.

Pada sekitar 80% kontribusi dari wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berasal dari kawasan Barat Indonesia, khususnya pulau Jawa dan Sumatra. Sementara itu pertumbuhan ekonomi nasional yang masih belum berkontribusi dengan baik dan optimal yaitu pada kawasan timur Indonesia. Berbagai upaya nyata untuk mengatasi kesenjangan tersebut, kementerian PPN/ Bappenas mengundang masyarakat luas, baik peneliti, mahasiswa, pakar pembangunan, akademisi, sektor wisata, pengambilan kebijakan, maupun masyarakat sipil untuk ikut serta pada ajang Call For Papers untuk Indonesia Development Forum (IDF) 2018.

Deputi pada Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan Call For Papers untuk Indonesia Development Forum (IDF) 2018 ini diharapkan dapat memberikan solusi dan inovasi pembangunan dalam mengatasi berbagai macam permasalahan ketimpangan wilayah. Terdapat berbagai macam gagasan inovatif dan membangun dalam mengatasi masalah kesenjangan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah berinisiatif untuk mengundang para ahli, akademisi serta masyarakat sipil dalam memberikan

terobosan dan gagasan baru yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Siregar, 2018).

Selain itu, Komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan pembangunan wilayah berkelanjutan harus dilaksanakan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, menekan kesenjangan sosial ekonomi dan ketimpangan antar wilayah. Hal itu dikemukakan oleh Dosen Geografi UGM, Dr. Luthfi Muta'ali, M.T., pada orasi ilmiah yang bertajuk *Penguatan Kerangka Kerja Pembangunan Wilayah Berkelanjutan di Indonesia* pada puncak acara Dies Natalis Fakultas Geografi UGM ke-54, Senin (4/8) di ruang Auditorium Merapi, Fakultas Geografi UGM.

Paradigma pembangunan wilayah ke depan setidaknya memiliki empat aspek penting, yakni mencapai pertumbuhan, pemerataan, kesejahteraan dan keberlanjutan yang berimbang. Diantara keempat aspek tersebut, keberlanjutan menjadi pondasi pembangunan wilayah dan menjadi tujuan jangka panjang. Ketimpangan pembangunan, terjadi antara Jawa dan luar Jawa, kawasan barat dan Timur, serta antar kota dan desa. Ia mengutip laporan BPS tahun 2016 yang menyebutkan 80,34% perekonomian terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Sementara sejumlah propinsi, seperti Aceh, Sumatera Selatan, Riau, sebagian besar Kalimantan dan Papua merupakan daerah penyumbang devisa terbesar negara karena kelimpahan sumber daya namun daerah-daerah tersebut justru mengalami kemunduran ekonomi terutama masalah kemiskinan di tingkat desa.

Di samping itu, kebijakan fiskal baru tentang pembagian dana bagi hasil yang besar bagi wilayah-wilayah tersebut ternyata belum juga mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesenjangan. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan antas sistem wilayah, baik perkotaan-perdesaaan maupun mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kesenjangan wilayah yang sistemik akhirnya, telah memunculkan niat pemerintah untuk melakukan revolusi spasial dengan melakukan pemindahan ibukota NKRI (Gusti, 2017).

Pada Tabel 1, Bisa dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB per tahun di Pulau Kalimantan merupakan yang terendah dibanding pulau lainnya, yaitu sebesar 4,32%. Oleh karena itu, Langkah Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota ke wilayah Kalimantan, merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi Kesenjangan Ekonomi antar wilayah.



Pemindahan ibu kota yang tengah direncanakan oleh pemerintah ternyata memiliki dampak ekonomi pada daerah baru tersebut. Pemindahan ibu kota ke lokasi baru di Luar Jawa tidak akan memberikan dampak negative terhadap perekonomian nasional. Efek positif tersebut disebabkan adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum dimanfaatkan. Nantinya, dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional menjadi +0,1%. Kemudian, pemindahan ibu kota akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan indikasi ketimpangan akan menyempit. Pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik ditingkat regional maupun di tingkat nasional.

Pemindahan ibu kota akan menyebabkan tambahan inflasi nasional yang minimal sebesar 0,3% basis poin walaupun pemindahan ibu kota baru akan menyebabkan tekanan dari sisi permintaan. Dampak inflasi di provinsi lokasi ibu kota baru akan menjadi sangat minimal jika provinsi tersebut memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih baik dan sektor produksi yang relatif beragam.

Selanjutnya, pemindahan ibu kota Negara ke luar jawa akan mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia diataranya perdagangan di dalam provinsi ibu kota baru. Lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika Ibu Kota Negara dipindah ke Provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik.

Pemindahan Ibu Kota Negara juga akan mendorong investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya. Selain itu, pemindahan ibu kota akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain serta meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional terutama sektor Jasa (Nurhanisah & Syaifullah, 2019).

Selain itu, Kajian Hasil Lingkungan Strategis atau KLHS cepat terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur telah rampung. Lewat kajian ini, pemerintah menerapkan 10 prinsip kota hutan dan pintar atau smart and forest di Ibu kota baru.

Adapun 10 prinsip kota hutan di ibu kota baru di antaranya : 1) ibu kota baru harus berbasis pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Saat ini, ada 38 DAS di lokasi ibu kota baru. 38 Das ini akan dikelola dengan konsep One River One Management. 2) memiliki jaringan ruang hijau yang terstruktur. 3) memanfaatkan sekitar 50 persen wilayah untuk



pengembangan ibu kota. 4) konsumsi air yang efisien 5) beban pemenuhan konsumsi penduduk yang rendah (low ecological footprint dan low carbon footprint). 6) memiliki kualitas udara yang baik dan suhu udara rata-rata sejuk. 7) mempunyai kualitas air pemukiman yang baik. 8) melindungi habitat satwa. 9) mempunyai kualitas tutupan lahan yang baik dan lanskap “Hutan Hujan Tropis” yang direvitalisasi dan 10) menerapkan elemen smart city untuk pengelolaan lingkungan (Pebrianto, 2020).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang Pengaruh adanya Pembangunan Berkelanjutan terhadap Kesenjangan Ekonomi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia terbukti mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tergolong positif yaitu pada kisaran 5 sampai 6,5% per tahun. Hal ini berdampak pada Pendapatan Per Kapita yang mengalami peningkatan, serta Kemajuan dari aspek bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Akan tetapi, hal ini nyatanya belum dapat mengatasi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia dikarenakan 80,34% perekonomian terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera, sehingga Ketimpangan pembangunan, terjadi antara Jawa dan luar Jawa, kawasan barat dan Timur, serta antar kota dan desa. Provinsi, seperti Aceh, Sumatera Selatan, Riau, sebagian besar Kalimantan dan Papua merupakan daerah penyumbang devisa terbesar negara karena kelimpahan sumber daya namun daerah-daerah tersebut justru mengalami kemunduran ekonomi terutama masalah kemiskinan di tingkat desa. Selain itu, penggunaan dana APBD belum dilaksanakan dengan baik karena penggunaan dana masih dipakai untuk hal yang tidak berdampak langsung pada perbaikan kualitas lingkungan, sehingga Konsep Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia itu sendiri masih dipertanyakan. Oleh karena itu, Pemerintah mengambil beberapa kebijakan dan solusi diantaranya mengadakan ajang Call For Papers untuk Indonesia Development Forum (IDF) 2018 yang diharapkan dapat memberikan solusi dan inovasi pembangunan dalam mengatasi berbagai macam permasalahan ketimpangan wilayah, yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain itu, Pemerintah mengambil Langkah yang besar dengan melakukan pemindahan Ibu kota Ke Wilayah Kalimantan, yang dapat menjadikan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik ditingkat regional maupun di tingkat nasional. Dan juga

Kajian Hasil Lingkungan Strategis atau KLHS terkait pemindahan ibu kota negara akan menerapkan 10 prinsip kota hutan dan pintar atau smart and forest di Ibu kota baru, sehingga masalah lingkungan akibat pembangunan Ibu kota baru ini dapat teratasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). diakses dari <https://www.bps.go.id/>

BKKBN. (2013). *Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia tahun 2013*. Jakarta

Fauzi. A. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Fauzi. A. dan Alex. O. (2014). The Measurement of Sustainable Development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 05. 01.

Fletcher, M.A. (March 10, 2013). *Research ties economic inequality to gap in life expectancy*.

Diakses dari [https://www.washingtonpost.com/business/economy/research-ties-economic-inequality-to-gap-in-life-expectancy/2013/03/10/c7a323c4-7094-11e2-8b8d-e0b59a1b8e2a\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/business/economy/research-ties-economic-inequality-to-gap-in-life-expectancy/2013/03/10/c7a323c4-7094-11e2-8b8d-e0b59a1b8e2a_story.html)

Gusti. (2017). Pembangunan Berkelanjutan Efektif Tekan Kesenjangan Wilayah. Diakses dari

<https://ugm.ac.id/id/berita/14645-pembangunan.berkelanjutan.efektif.tekan.kesenjangan.wilayah>

Kumalasari, U. (2019). *Kerangka Berpikir*. Diakses dari <https://rumus.co.id/kerangka-berpikir/>

Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : AMP YKPN.

Moldan B dan Dahl AL. (2007). *Meeting Conceptual Challenges dalam Hak T, Moldan B, Dahl AL (Ed.) Sustainability Indicators: A Scientific Assessment*. Scientific Committee on Problem of the Environment (SCOPE).

Nurhanisah, Y. & Syaifullah, A. (2019). *Dampak Ekonomi Pemindahan Ibu Kota*. Diakses dari [http://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/dampak-ekonomi-pemindahan-ibu-kota](http://indonesiabaik.id/motion_grafis/dampak-ekonomi-pemindahan-ibu-kota)

Pebrianto, F. (2020). *10 prinsip agar ibu kota baru jadi kota hutan dan pintar*. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1306257/10-prinsip-agar-ibu-kota-baru-jadi-kota-hutan-dan-pintar/full&view=ok>

Pembangunan Berkelanjutan. (2013, Juli 16). Diakses dari <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pembangunan-berkelanjutan-1>

Pezzey, J. (1992). Sustainability: An Interdisciplinary Guide. *Environmental Values* 1 (4): 321-62.

Prasetyo, A. (2016). *Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Diakses dari <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>

Setiawan, B. (2000). *Kota yang Berkelanjutan*. Yogyakarta : Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada.

Setiawan, S. (2020). “*Studi Kepustakaan*” *Pengertian & ( Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi)*. Diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepuustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/>

Siregar, D.I. (2018). *Upaya Pemerintah menghilangkan ketimpangan wilayah timur Indonesia*. Diakses dari <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/JKRnnBxK-upaya-pemerintah-mengurangi-ketimpangan-wilayah-timur-indonesia>

Siswono, E. (2015). *Ekologi Sosial*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Tusianti E. (2013). *Synergistic Development Performance In Indonesia Making Sustainable Development Practical*. [Tesis]. Bandung : Institut Teknologi Bandung dan University of Groningen

World Bank. (1990). *World Development Report 1990 : Poverty*. Oxford : Oxford University Press.

Ariyanti, R., & Lutfi, M. (2023). PENGEMBANGAN BANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR BERSIH DESA CINANGKA KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR. SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya, 1(1), 18-30. doi:10.32832/jpmuj.v1i1.1670

Maulani, D., Wulandari, A., Octaviani, N., & Sukaesih, P. (2023). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KELOMPOK USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DESA SUKAJADI. SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya, 1(2), 53-63. doi:10.32832/jpmuj.v1i2.1905

Yanuarsyah, I., Purnomo, M., & Kamilah, N. (2024). DIJITALISASI E-COMMERCE WARUNG SAYUR IBU ECIH BERBASIS ANDROID. SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya, 2(1), 33-43. doi:10.32832/jpmuj.v2i1.1947

Ramadhany, T., & Maulani, D. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN KONTEN DIGITAL MARKETING DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PRODUK ROTI AFIKA SARI. SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya, 2(2), 137-146. doi:10.32832/jpmuj.v2i2.2268

Aminda, R., Aminda, A., & Rizki, M. (2024). ANALISA CAPAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI KABUPATEN BOGOR. SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya, 2(2), 190-207. doi:10.32832/jpmuj.v2i2.2279

Aminda, R., & Aminda, A. (2024). IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN BOGOR. SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya, 2(2), 208-223. doi:10.32832/jpmuj.v2i2.2280